BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Tempat yang menjadi objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri, yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran khususnya bagian Sub Bagian kepegawaian yang berlokasi Jl. Raya Bandung – Sumedang Km. 21 Jatinangor.

3.1.1. Sejarah Singkat FISIP Unpad

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, didirikan atas desakan dan tuntutan warga masyarakat Provinsi Jawa Barat ketika itu, yang mengharapkan Universitas Padjadjaran menumbuhkan keilmuan yang dapat merespons realitas sosial dan kemanusiaan yang dinamis di Jawa Barat.

Untuk menjawab keinginan tersebut, Presiden Universitas Padjadjaran, sebutan rektor pada saat itu, mengeluarkan Surat Keputusan No 4/PKUP/1958, tanggal 28 Februari 1958 tentang pembentukan Panitia Ad-hoc yang bertugas mempersiapkan pembentukan fakultas. Baru pada tanggal 13 Oktober 1958 prakarsa tersebut direalisasi dengan terbentuknya Fakultas Administrasi Negara dan Niaga sebagai fakultas yang berada di bawah asuhan Yayasan Pembina Universitas Padjadjaran. Namun, dua tahun kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No. 66971/UU/60, tanggal 12 Agustus 1960, dikukuhkan Fakultas Sosial

Politik (Sospol) nama fakultas yang sesuai dengan nomenklatur Kementerian P dan K masa itu sebagai salah satu fakultas yang berada dalam lingkungan Universitas Padjadjaran.

Sejak tanggal 8 Desember 1983, nama Fakultas Sospol kemudian diubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 1574/1/1983.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, merupakan salah satu unit pelaksana teknis dibidang pendidikan. Pada saat ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran memiliki 4 (empat) jenjang program pendidikan, yaitu :

1. Program S1 Reguler
2. Program S1 Kelas Khusus
3. Program Diploma III
4. Program Pascasarjana

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis dibidang pendidikan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berada dalam lingkungan Universitas Padjadjaran yang berkedudukan atau berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Departemen Pendidikan Nasional.

Kedudukan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sama halnya dengan fakultas-fakultas lain mengacu kepada keputusan Menteri tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

1. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Padjadjaran yang berada di bawah Rektor.
2. Fakultas dipimpin oleh Dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Dalam melaksanakan tugas, Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan.
4. Pembantu Dekan berada dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

Dalam usaha pencapaian tujuan yang telah direncanakan fakultas, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan motivasi kerja pegawai, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran diserahkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha, untuk memimpin dan menggerakkan para bawahannya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang telah dilimpahkan kepadanya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

Tugas pokok Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran adalah mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat ilmu, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran berfungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan.
2. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Melaksanakan urusan tata usaha fakultas.

3.1.2. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Berikut ini adalah visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran :.

1. Visi

”FISIP Unpad menjadi lembaga pendidikan tinggi yang memiliki komitmen terhadap keunggulan bidang ilmu sosial dan ilmu politik.”

2. Misi
    a) Melaksanakan pendidikan bidang ilmu sosial dan ilmu politik yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berdaya saing secara moral maupun akademis yang bermanfaat bagi masyarakat.
    b) Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna menopang pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi komunitas akademik, pemerintah, industri dan masyarakat umum.
    c) Melaksanakan manajemen pendidikan dengan menerapkan prinsip penjaminan mutu (quality assurance).
    d) Menerapkan sistem manajemen profesional berbasis transparansi dan akuntabilitas untuk menciptakan hubungan kelembagaan yang efektif dan efisien.
    e) Menjalin hubungan kerjasama secara berkesinambungan dengan menerapkan prinsip kesetaraan, kemitraan dan saling percaya.

3.1.3. Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Struktur organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran merupakan suatu gambaran kerangka skema yang menunjukkan kerja antara satuan unit organisasi yang terkait di dalamnya terdapat para pejabat yang mempunyai kedudukan, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pekerjaannya dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dibentuknya struktur organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, dimaksudkan untuk mengendalikan, mengarahkan perilaku para pejabat untuk melaksanakan tugas pekerjaan yang telah dilimpahkan kepadanya, sehingga sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran adalah sebagai berikut :

1) Senat
2) Dekan dan Pembantu Dekan, yang terdiri dari :
    a. Pembantu Dekan bidang akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Dekan I
    b. Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Pembantu Dekan II
    c. Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Pembantu Dekan III

3) Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan yang terdiri dari :
        1. Urusan Perlengkapan
        2. Urusan Rumah Tangga
        3. Urusan Tata Usaha
        4. Urusan Umum dan Perlengkapan/Tata Usaha Program D3
        5. Urusan Umum dan Perlengkapan/Tata Usaha Program S1 Kelas Khusus
        6. Urusan Umum dan Perlengkapan/Tata Usaha Program Pascasarjana
    b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian yang terdiri dari :
        1. Urusan Keuangan
        2. Urusan Administrasi Kepegawaian Tenaga Edukatif
        3. Urusan Administrasi Kepegawaian Tenaga Administrasi
    c. Sub Bagian Pendidikan yang terdiri dari :
        1. Urusan Ujian
        2. Urusan Perpustakaan
        3. Urusan Pendidikan/kemahasiswaan Program D3
        4. Urusan Pendidikan/kemahasiswaan Program S1 Kelas Khusus
        5. Urusan Pendidikan/kemahasiswaan Program Pascasarjana
    d. Sub Bagian Kemahasiswaan yang terdiri dari :
        1. Urusan Registrasi dan Herregistrasi
        2. Urusan Kesejahteraan Mahasiswa

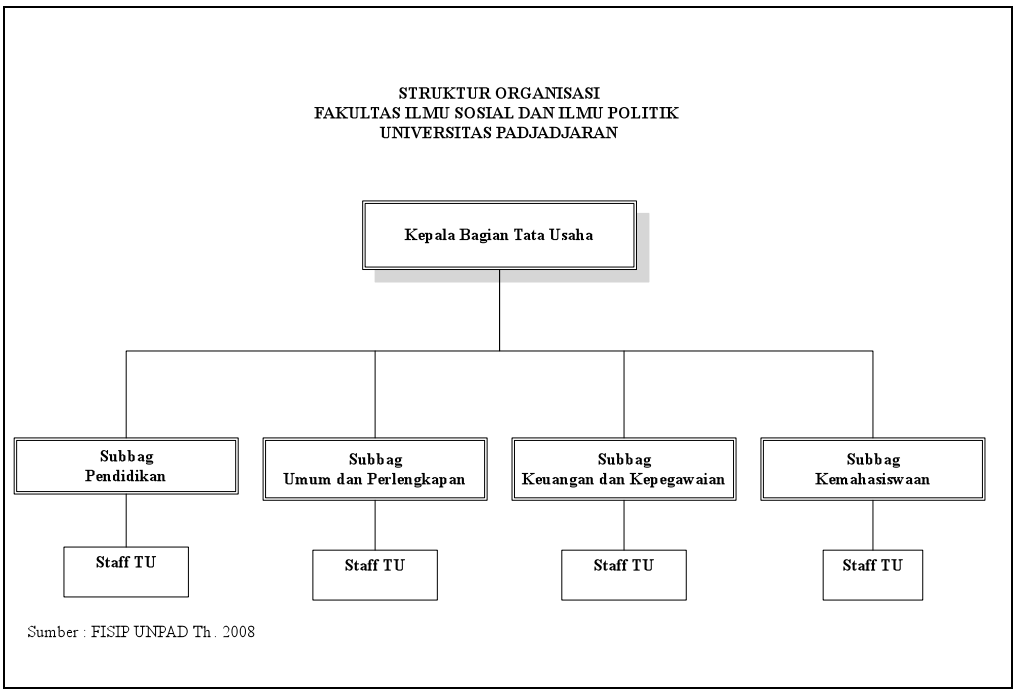
3. Urusan Kemahasiswaan/Alumni Program D3
4. Urusan Kemahasiswaan/Alumni Program S1 Kelas Khusus
5. Urusan Kemahasiswaan/Alumni Program Pascasarjana

4) Jurusan

5) Laboratorium

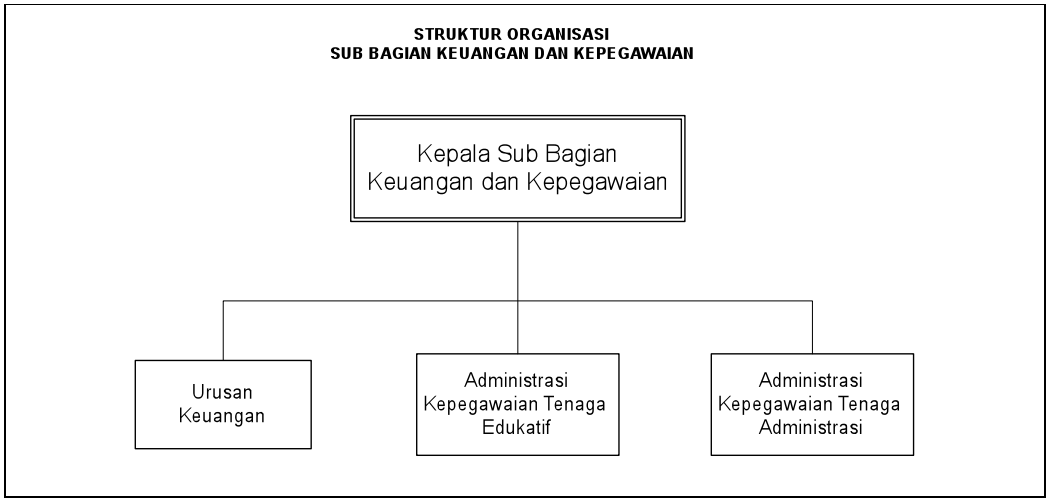
6) Dosen

Untuk lebih jelasnya mengenai Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dalam lingkup Kepala Bagian Tata Usaha dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

3.1.4. Deskripsi Tugas

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi dibidang keuangan dan kepegawaian fakultas.

Uraian tugas dari Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

1) Menyusun rencana dan program kerja Subbagian
2) Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kepegawaian
3) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data di bidang keuangan dan kepegawaian
4) Melakukan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan
5) Melakukan pembayaran gaji, tunjangan ikatan dinas, lembur, vakasi, perjalanan dinas, pekerjaan borongan dan pembelian
6) Mempersiapkan usulan formasi pegawai

7) Mempersiapkan usul mutasi, pengembangan dan kesejahteraan pegawai
8) Mempersiapkan usul pengangkatan dosen luar biasa
9) Melakukan urusan pemberian cuti pegawai
10) Melakukan penyusunan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Induk (Karin), Kartu Isteri (Karis), Kartu Suami (Karsu), Asuransi Kesehatan (Askes), Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), Surat Keterangan Untuk Mendapat Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP4) dan Lembar Pembayaran Pajak Pembangunan (LP2P)
11) Melakukan urusan penyelesaian kasus kepegawaian
12) Mempersiapkan usul pemberian penghargaan pegawai
13) Melakukan penyimpanan dokumen dan surat di bidang keuangan dan kepegawaian
14) Menyusun laporan Sub Bagian.

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode penelitian yang dilakukan meliputi :

3.2.1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada Sub Bagian Kepegawaian FISIP Unpad. Metode deskriptif yaitu suatu metode dengan cara

mengumpulkan data kemudian disusun dan dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai masalah yang dihadapi pada saat penelitian.

3.2.2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data adalah bentuk data penelitian berdasarkan cara mendapatkannya. Sedangkan metode pengumpulan data adalah cara atau jalan yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Adapun cara atau jalan yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi atau pengamatan (*observation*) merupakan salah satu teknik pengumpulan fakta/data (*fact finding technique*) yang cukup efektif untuk mempelajari sistem. Pada tahap awal, peneliti melakukan pengumpulan data atau informasi, lalu peneliti melakukan observasi secara terfokus, sehingga peneliti akan menyempitkan data atau informasi yang diperlukan.

2. Wawancara

   Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pegawai di FISIP Unpad khususnya Sub Bagian Kepegawaian, sehingga didapatkan informasi mengenai data kepegawaian di FISIP Unpad.

3. Dokumentasi

   Kajian dokumen merupakan sarana yang cukup membantu peneliti dalam pengumpulan data atau informasi karena dengan cara ini, peneliti dapat membaca dokumen atau catatan tanpa mengganggu aktivitas dari objek penelitian.

3.2.2.1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan berupa teks hasil dari wawancara dan diperoleh dengan malalui wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data primer yang berada pada Sub Bagian Kepegawaian, diperlukan adanya interaksi langsung terhadap pihak FISIP Unpad .

3.2.2.2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang telah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Dalam pengumpulan data-data sekunder, bisa didapatkan dari sumber-sumber yang pada umumnya menggunakan metode analisis substansi dokumen, surat keputusan, laporan yang sudah terdokumentasikan.

3.2.3. Metode Pendekatan dan Pengembangan Sistem

Metode pendekatan dan pengembangan sistem merupakan suatu metode yang akan digunakan dalam melakukan perancangan sistem informasi.

3.2.3.1. Metode Pendekatan Sistem

Metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perancangan terstruktur. Pendekatan perancangan terstruktur dimulai dari awal 1970. Pendekatan terstruktur dilengkapi dengan alat-alat (*tools*) dan teknik-teknik (*techniques*) yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem.

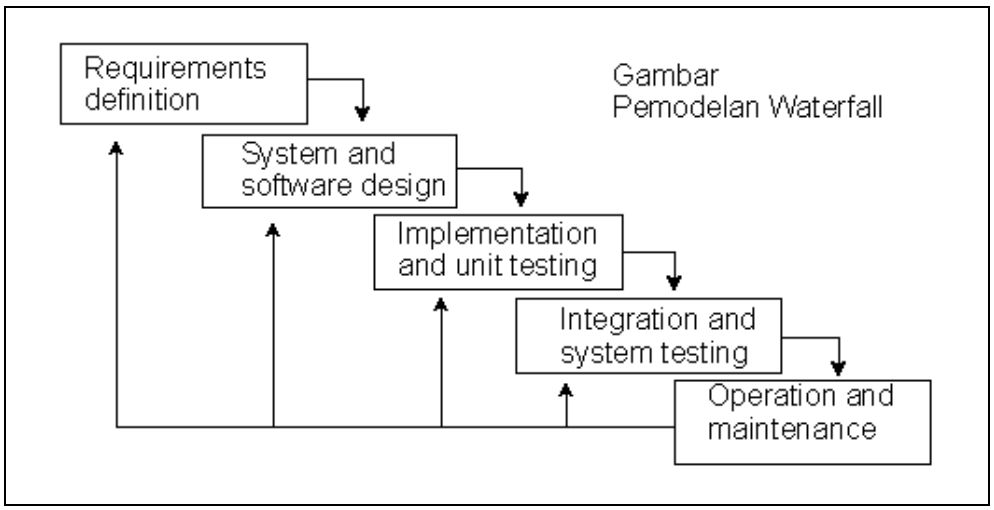
Melalui pendekatan terstruktur, permasalahan yang komplek di organisasi dapat dipecahkan dan hasil dari sistem akam mudah untuk dipelihara, fleksibel, lebih memuaskan pemakainya, mempunyai

dokumentasi yang baik, tepat waktu, sesuai dengan anggaran biaya pengembangan, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitasnya akan lebih baik (bebas kesalahan).

3.2.3.2. Metode Pengembangan Sistem

Metoda pengembangan sistem yang digunakan adalah dengan menggunakan metoda Model *Waterfall.*

Menurut Al-Bahra Bin Ladjamudin (2006 : 16) Model ini telah diperoleh dari proses engineering lainnya. Model ini menawarkan cara pembuatan perangkat lunak secara lebih nyata.



Gambar 3.3 Siklus Hidup (*Life Cycle*) dengan model-model *Waterfall*

(Sumber : Rekayasa Perangkat Lunak. Oleh : Al-Bahra Bin Ladjamudin)

Langkah-langkah yang penting dalam model ini adalah:

1. Penentuan dan analisis spesifikasi

   Jasa, kendala dan tujuan dihasilkan dari konsultasi dengan pengguna sistem. Kemudian semuanya itu dibuat dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh user dan staf pengembang.

2. Desain sistem dan perangkat Lunak

   Proses desain sistem membagi kebutuhan-kebutuhan menjadi sistem perangkat lunak atau perangkat keras. Proses tersebut menghasilkan sebuah arsitektur sistem keseluruhan. Desain perangkat lunak termasuk menghasilkan fungsi sistem perangkat lunak dalam bentuk yang mungkin ditransformasi ke dalam satu atau lebih program yang dapat dijalankan.

3. Implementasi dan ujicoba unit

   Selama tahap ini desain perangkat lunak disadari sebagai sebuah program lengkap atau unit program. Uji unit termasuk pengujian bahwa setiap unit sesuai spesifikasi.

4. Integrasi dan uji coba sistem

   Unit program diintegrasikan dan diuji menjadi system yang lengkap untuk meyakinkan bahwa persyaratan perangkat lunak telah dipenuhi. Setelah ujicoba, sistem disampaikan ke customer.

5. Operasi dan pemeliharaan

   Normalnya, ini adalah phase yang terpanjang. Sistem dipasang dan digunakan. Pemeliharaan termasuk pembetulan kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru ditemukan.

3.2.3.3. Alat Bantu Analisis dan Perancangan

1) Flow Map

Flowmap merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir yang termasuk tembusan-tembusannya juga merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi serta dapat mengevaluasi suatu permasalahan yang diharapkan diusulkan perbaikan-perbaikannya.

2) Diagram Konteks

Menurut Al-Bahra Bin Ladjamudin (2005 : 64) Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input ke sistem atau output dari sistem. Ia akan memberi gambaran tentang keseluruhan sistem. Sistem dibatasi oleh *boundary* (dapat digambarkan dengan garis putus). Dalam diagram konteks hanya ada satu proses. Tidak boleh ada store dalam diagram konteks.

3) Data Flow Diagram (DFD)

Menurut Al-Bahra Bin Ladjamudin (2005 : 64) Diagram Aliran Data atau Data Flow Diagram merupakan model dari sistem untuk menggambarkan pembagian sistem ke modul yang lebih kecil. Salah satu keuntungan menggunakan DFD adalah memudahkan pemakai atau

user yang kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem yang akan dikerjakan.

4) Kamus Data

Menurut Jogiyanto (2005 : 725). Kamus Data (KD) atau *data dictionary* (DD) atau disebut juga dengan istilah *systems data dictionary* adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Dengan menggunakan kamus data, analisis sistem dapat mendefinisikan data yang mengalir di sistem dengan lengkap.

Kamus data dibuat berdasarkan arus data yang ada di DAD. Arus data yang di DAD sifatnya global, hanya ditunjukkan nama arus datanya saja. Untuk keperluan ini maka kamus data harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Nama arus data

   Nama arus data harus dicatat pada kamus data, sehingga mereka yang membaca DAD memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang suatu arus data tertentu dan dapat langsung mencarinya dengan mudah di kamus data.

b. Alias

   Alias atau nama lain dari data dapat dituliskan bila nama lain ada. Alias perlu ditulis karena data yang sama mempunyai nama yang berbeda untuk orang atau departemen satu dengan yang lainnya.

c. Bentuk Data

Bentuk data perlu dicatat di kamus data, karena dapat digunakan untuk mengelompokkan kamus data ke dalam kegunaannya sewaktu perancangan sistem

d. Arus data

Arus data menunjukkan dari mana data mengalir dan kemana data akan menuju. Keterangan arus data ini perlu dicatat di kamus data untuk memudahkan mencari arus data di DAD

e. Penjelasan

Untuk memperjelas tentang makna dari arus data yang dicatat di kamus data, maka bagian penjelasan dapat diisi dengan keterangan-keterangan tentang arus data tersebut.

f. Periode

Periode ini menunjukkan kapan terjadinya arus data ini

g. Volume

Volume yang perlu dicatat di kamus data adalah tentang volume rata-rata dan volume puncak dari arus data.

h. Struktur data

Struktur data menunjukkan arus data yang dicatat di kamus data terdiri dari item-item data apa saja.

5) Perancangan Basis Data

a Normalisasi

Menurut Al-Bahra Bin Ladjamudin (2005 : 168) Proses Normalisasi pertama kali diperkenalkan oleh E.F. Codd pada tahun

1972. Normalisasi sering dilakukan sebagai uji coba pada suatu relasi secara berkelanjutan untuk menentukan apakah relasi tersebut sudah baik atau masih melanggar aturan-aturan standar yang diberlakukan pada suatu relasi yang normal (sudah dapat dilakukan proses insert, update, delete, modify pada satu atau beberapa atribut tanpa mempengaruhi integritas data dalamrelasi tersebut).

Normalisasi adalah proses pengelompokkan data kedalam bentuk tabel atau relasi atau file untuk menyatakan entitas dan hubungan mereka sehingga terwujud satu bentuk database yang mudah untuk dimodifikasi.

Dalam Perspektif normalisasi sebuah database dikatakan baik jika setiap tabel yang membentuk basis data sudah berada dalam keadaan normal. Tahap normalisasi dimulai dari tahap paling ringan (1NF) hingga paling ketat (5NF). Biasanya hanya sampai pada tingkat 3NF atau BCNF, karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik.

b Tabel Relasi

Tabel Relasi Merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan tabel yang lainnya, yang berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Hubungan yang dapat dibentuk dapat mencakupi 3 (tiga) macam hubungan yaitu ;

1. One-To-One (1 – 1)

   Mempunyai pengertian setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu.

2. One –To-Many (1 – ∞)

   Mempunyai pengertian setiap baris data dari tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih data pada tabel ke dua.

3. Many-To-Many (∞ – ∞)

   Mempunyai pengertian satu baris atau lebih data pada tabel pertama bisa dihubungkan ke satu atau lebih baris data pada tabel ke dua.

3.2.4. Pengujian Software

Menurut Al-Bahra Bin Ladjamudin (2005 : 351). Pengujian Perangkat Lunak adalah proses menjalankan dan mengevaluasi sebuah perangkat lunak secara manual maupun otomatis untuk menguji apakah perangkat lunak sudah memenuhi persyaratan atau belum dan untuk menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya.

Faktor-faktor pengujian yang dilakukan meliputi:

1. Kebutuhan yang berkaitan dengan penanganan keluhan pelanggan.
2. Pendefinisian spesifikasi fungsional
3. Penentuan spesifikasi kegunaan
4. Penentuan kebutuhan portabilitas
5. Pendefinisian antar muka sistem.

3.2.4.1. Pengujian Black Box

Menurut Al-Bahra bin Ladjamudin (2006 : 359). Pengujian black-box berkaitan dengan pengujian yang dilakukan pada interface perangkat lunak. Meskipun didesain untuk mengungkap kesalahan, pengujian black-box digunakan untuk memperlihatkan bahwa fungsi-fungsi perangkat lunak adalah operasional; bahwa input diterima dengan baik dan output dihasilkan dengan tepat dan integritas informasi eksternal (seperti file data) dipelihara. Pengujian black-box menguji beberapa aspek dasar suatu sistem dengan sedikit memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak tersebut.

Pengujian black-box berusaha menemukan kesalahan dalam kategori sebagai berikut :

a. Fungsi yang tidak benar atau hilang,
b. Kesalahan interface,
c. Kesalahan dalam stuktur data atau akses database eksternal,
d. Kesalahan kinerja,
e. Inisialisasi dan kesalahan terminasi.

Pada program aplikasi kepegawaian ini dilakukan pengujian dengan kategori-kategori diatas.